

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN
PENGEMBANGAN PELAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK(SPBE) MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA KENDARI**

Muhammad Jabarnur Aldiansa

NPP. 29.1605

Asal Pendaftaran Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: aldymina88@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The development of government digitalization is very helpful in the service process to the community. Many factors influence the utilization and development of an electronic-based government system. Research entitled Electronic-Based Government System (SPBE) is a government administration that uses information and communication technology for government development in providing services to the community. **Purpose:** This study aims to determine the strategy of the Kendari City Government through the Information Communications Service in implementing the Development and Utilization of an Electronic-Based Government System and to determine what strategic steps should be taken in the development and utilization of SPBE in Kendari City. **Method:** The researcher uses a qualitative research type of intrinsic case study because the researcher wants to understand better and reveal an in-depth and detailed picture of the Electronic-Based Government System. **Result:** Based on the results of the study, it shows that in optimizing services to the community using information technology to make it easier for the community to take care of things in the related department with the ease of the system because it can be accessed online. **Conclusion:** The City Government makes LAIKA a metadata which becomes one data to connect between agencies which is certainly very effective in government administration circles.*

Keyword : *Strategy, Digitalisation, Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan digitalisasi pemerintahan sangat membantu dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan serta pengembangan system pemerintahan berbasis elektronik. Penelitian Berjudul Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. **Tujuan:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi Informatika dalam melaksanakan Pengembangan serta Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Untuk Menentukan langkah strategis apa saja yang harus di ambil dalam pengembangan serta pemanfaatan SPBE di Kota Kendari. **Metode:** Peneliti menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif studi kasus instrinsik karna peneliti ingin memahami lebih baik serta mengungkapkan gambaran yang mendalam dan detail tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pengoptimalan pelayanan terhadap masyarakat menggunakan teknologi informasi demi memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu di dinas terkait dengan mudahnya system karena bisa di akses secara online. **Kesimpulan:** Pemerintah Kota menjadikan LAIKA sebagai metadata dimana menjadi satu data untuk menghubungkan antar instansi yang tentunya sangat efektif fikalangan pertatausahaan pemerintahan.

Kata Kunci : Strategi, Digitalisasi, Pemerintahan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola segala sesuatu yang ada pada suatu negara, di Negara Indonesia dalam memudahkan pemerintah dalam pengaturan daerah daerah yang ada maka dibentuklah pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014. Berdasarkan urusan pemerintahan di atur dalam undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan dasar pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang- undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah

perlu menggunakan strategi khusus bagaimana merancang layanan publik prima di era otonomi daerah sekarang ini. Strategi yang dimaksud tentu menggunakan perangkat teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi dengan hadirnya istilah sistem layanan online maka efisiensi dan efektivitas akan bisa terwujud dengan baik. Bagaimana menggunakan perangkat teknologi informasi untuk layanan publik yang prima tentu akan semakin didukung oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan kebijakan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan terbitnya PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah yang didalamnya mengatur tentang penggabungan urusan Pemerintah dalam satu dinas, didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintah Daerah. Terkait dengan Dinas Komunikasi dan informatika yang ada di pemerintahan daerah maka perimpunan urusan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan PP No 18 tahun 2016 dalam pasal 40 Ayat(4), meliputi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

1.2 Kesenjangan masalah yang diambil

Secara geografis, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya, Kota Kendari memiliki banyak kendala. Beberapa fenomena yang ditemukan melalui kajian dan review publikasi penelitian sebelumnya tentang pertumbuhan E-government di Kota Kendari, menunjukkan bahwa implementasi e-government masih belum ideal, Jika melihat dan di jadikan bahan acuan, pada seluruh daerah-daerah maju sebagian di Indonesia sangat terdukung oleh kemajuan melayani masyarakat dengan menjadikan bahan acuan pada pelayanan berbasis e-government. Berdasarkan hasil wawancara dengan ASN bagian pengelolaan SPBE Bapak Firman Salam, Beliau mengatakan:

“Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Kendari, sudah dapat memperlihatkan predikat cukup yang dari gambaran pelaksanaan SPBE internal beberapa aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan namun masih dalam tingkatan standard. Namun masih ada dua aspek yang lemah, yaitu Aspek Kelembagaan dan Strategi dan Perencanaan”.

Hal ini menyebabkan Pemerintah Kota Kendari tidak dapat melaksanakan SPBE secara maksimal, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari layanan pemerintah secara maksimal. Kurangnya Perbaikan Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Kendari. Aspek Kelembagaan perlu ditingkatkan dengan menyusun Tim Pengarah SPBE serta pengaturan tentang Proses Bisnis Terintegrasi yang memungkinkan terjadinya proses integrasi dan kolaborasi layanan. Aspek strategi dan Perencanaan perlu dibangun dengan menyusun Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah dan Anggaran dan Belanja TIK, yang nantinya digunakan sebagai acuan dan peta jalan pengembangan seluruh aspek SPBE di Pemerintah Kota Kendari. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu ditingkatkan dengan Menyusun kebijakan Internal yang mengatur terkait Pengoperasian Pusat Data dan Integrasi Sistem Aplikasi sesuai dengan Rencana Induk SPBE yang dibangun. Aspek

Layanan Publik yang belum ada agar dapat dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku serta mengacu rencana induk SPBE Pemerintah Kota Kendari. Selain itu, Pemerintah Kota Kendari masih belum optimal dalam inisiatif penerapan Manajemen SPBE dan aspek penerapan SPBE lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan masih kurang optimalnya tata kelola SPBE yang terpadu. Menurut masyarakat umum kota kendari melalui wawancara tentang SPBE ada beberapa hal evaluasi dalam berjalannya SPBE di Kta Kendari yaitu Kurangnya sosialisasi Beberapa Aplikasi umum layanan publik dari instansi pemerintah Kota Kendari melalui Diskominfo dalam pemanfaatannya sehingga beberapa masyarakat kota Kendari masih banyak yang belum tau, Jangkauan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat kota Kendari belum maksimal dalam pendistribusiannya, dan terbatasnya jumlah pegawai ASN dalam lingkup sumber daya manusianya dalam mengelola teknis terkait teknologi informasi menjadi alasan mengapa SPBE di penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara keseluruhan belum optimal . Hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Kendari serta dinas terkait agar tercapainya pelayanan prima pemerintahan daerah berbasis elektronik teknologi infomasi. Serta anggaran dalam pengembangan SPBE masih terbatas.

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yaitu Ludi Awaludin pada jurnal yang berjudul ” Strategi Penguatan Kompetensi SDM Teknologi Informasi&Komunikasi(TIK) dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” tahun 2019 yang menemukan bahwa SDM TIK merupakan bagian terpenting dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE), sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat untuk dapat menguatkan kompetensi SDM TIK. Dari hasil evaluasi terhadap nilai pretest dan posttest terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kompetensi SDM. Output yang di hasilkan yaitu terbangunnya aplikasi e-learning didiskominfo dan statistic serta terbangunnya laboratorium multimedia di Dinas Kominfo. Penelitian Namira Abda Taqiya (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Tingkat Kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika JawaTimur” dengan hasil penelitian yaitu RACI Chart pada Cobit 4.1 memiliki fungsi sebagai petunjuk peran dan tanggung jawab suatu jabatan dalam organisasi terhadap suatu aktivitas dalam sebuah organisasi yang berada pada pengontrolan teknologi. Penelitian Hamrun, Ahmad Harakan, Andi Luhur Prianto (2018) dalam penelitian “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E- Government di Kabupaten Muna” dengan penemuan bahwa Secara empiris dan fakta setelah dilakukan observasi di lapangan maka Strategi pemerintah kabupaten Muna dalam pengembangan pelayan berbasis EGovernment di Kabupaten Muna meliputi persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Penelitian Yono tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul ” Penerapan Elektronik Government Sebagai Media Promosi Pariwisata Berbasis Online Di Kabupaten Manggarai Barat” dengan hasil temuan bahwa kebijakan penerapan elektronik government di bidang promosi pariwisata yang ada di

Kabupaten Manggarai Barat, mengacu pada kebijakan pemerintah nomor 95 tahun 2018 terkait penyelenggaraan layanan publik dengan menggunakan media elektronik di semua level pemerintahan yang dikenal dengan sebutan (SPBE). Kemudian penelitian Abdul Bouty dan Dian Novian (2019) dalam jurnalnya “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo)” dengan temuan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah Kota Gorontalo memperoleh predikat BAIK dengan total nilai indeks yang dicapai sebesar 2.88. Beberapa indikator yang memiliki nilai indeks terendah dari hasil pengukuran dan penilaian diinformasikan dalam penelitian ini untuk selanjutnya menjadi rekomendasi perbaikan bagi pemerintah Kota Gorontalo.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana focus dan lokus penelitian yang berbeda dengan basic lokasi penelitian yaitu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu konteks penelitian yang dilakukan yakni cenderung pada bagaimana cara atau langkah yang harus diambil agar Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dapat dimanfaatkan dengan baik. Tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya focus meneliti bagaimana selama ini implementasi E-Government di daerah terkait apa sekaligus apa yang menjadi factor penghambat peningkatan sistem tersebut.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi Informatika dalam melaksanakan Pengembangan serta Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan menentukan langkah strategis apa saja yang harus di ambil dalam pengembangan serta pemanfaatan SPBE di Kota Kendari.

II. METODE

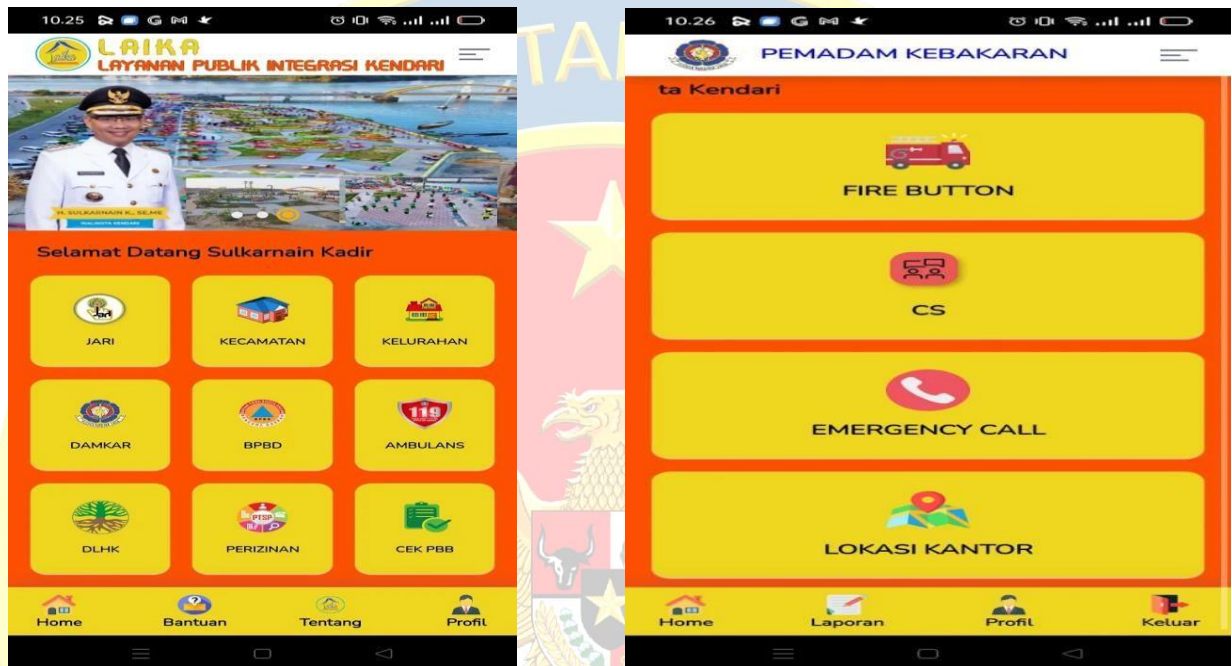
Peneliti menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif studi kasus intrinsik karna peneliti ingin memahami lebih baik serta mengungkapkan gambaran yang mendalam dan detail tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Untuk Menentukan langkah strategis apa saja yang harus di ambil dalam pengembangan serta pemanfaatan SPBE di Kota Kendari. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif *Case Study Research* atau Studi Kasus yang merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyeliki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sulawesi Tenggara khususnya ibu kota Kendari sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Kota Kendari dalam urgensi meningkatkan masyarakat berbasis ekologi, teknologi, dan informasi dalam kaitannya untuk mewujudkan masyarakat berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kota mengeluarkan system terbaru untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yakni aplikasinya dikenal dengan sebutan LAIKA atau Layanan Integrasi Kendari. Berikut adalah contoh aplikasi yang dibuat oleh pemerintah :

Gambar 3. 1 Tampilan Awal Aplikasi Layanan Jaga Kendari



Halaman Login. Sumber : LAIKA
 Sumber : Aplikasi LAIKA hasil ScreenShoot

Demi memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai aplikasi pelayanan kelurahan, pelayanan surat keterangan domisili usaha, surat pengantar kematian serta layanan administrasi lainnya, masyarakat dapat memanfaatkan Aplikasi LAIKA Kendari yang bisa didapatkan melalui Playstore bagi Android dan di Website KendariKota.go.id . Aplikasi LAIKA memudahkan pemerintahan dalam pelayanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan masih banyak lagi layanan pemerintahan berbasis elektronik yang dapat diakses masyarakat Kota Kendari dalam pelayanan publik.

3.1 Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari

1) Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan berbasis elektronik

Pemanfaatan dan pengembangan SPBE di Kota Kendari semakin mendorong penatausahaan pemerintahan yang lebih baik. Kota Kendari memang mendorong penatausahaan pemerintah sebagaimana LAIKA dikembangkan untuk prioritas pelayanan masyarakat dengan fitur-fitur terbaru yakni Pemadam Kebakaran,

Pembuatan KK , KTP maupun surat izin menikah dan beberapa pelayanan lainnya yang masih terus dikembangkan . Sebelumnya LAIKA hanya sebagai system kini semakin diinovasikan , sebelumnya hanya sebagai pengampu data-data desa/kelurahan saat ini menjadi inovasi terbaru sebagai aplikasi pelayanan masyarakat Sulawesi Tenggara . Berdasarkan hasil wawancara antara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa LAIKA sebagai salah satu system yang sudah terinovasi dan terintegrasi sebagai pendukung system penatausahaan dan sebagai wujud pengembangan dari SPBE .

Penyelenggaraan Urusan Anggaran Akan Semakin Efisien dimana pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadidaerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan SPBE tentunya membutuhkan biaya yang harus dipersiapkan dengan matang. SPBE harus iaktualisasikan bersama pemerintah setempat dan KEMINFO . Apabila secara finansial dan praktisi terjamin dengan jelas maka proses pengembangan SPBE akan dimaksimalkan semaksimal mungkin. SPBE harus membutuhkan pematangan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia yang terakredibitasi .

2) Mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi Pemerintah dan Pemerintahan daerah

Pengembangan SPBE yang diaktualisasikan dalam system aplikasi LAIKA sebagai system yang akan dijadikan pusat data untuk Pemerintah Kota Kendari . Secara general , penginputan data memang membutuhkan waktu yang tidak diketahui relatif cepat atau lambat . Namun, system yang telah dibuat ini sangat efektif dan efisien untuk menemukan dan memperoleh data dengan waktu yang relative cepat. LAIKA yang dijadikan system oleh Pemerintah dan instansi terkait dimana system ini sudah direalisasikan penggunaannya sejak awal. LAIKA pada pengembangan pertama difungsikan sebagai system administrasi dan penginputan dikelurahan secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa secara menyeluruh proses penginputan dan pemerolehan data sudah terwujud dalam pengembangan SPBE. Pemerintah Kota menjadikan LAIKA sebagai metadata dimana menjadi satu data untuk menghubungkan antar instansi yang tentunya sangat efektif dikalangan pertatausahaan pemerintahan.

3) Mendorong Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi Pemerintah dan Pemerintahan daerah

Penggunaan Aplikasi Yang Menyeluruh Di Seluruh Instansi Sistem aplikasi kepegawaian ialah aplikasi yang di pakai untuk membantu kinerja di bidang kepegawaian pada saat melakukan aktivitas pelayanan. LAIKA sudah digunakan oleh seribu lebih pengguna namun berdasarkan pendapat dari Kepala bidang Informasi dan Komunikasi bahwa selain Aplikasi LAIKA , Pemerintah Sulawesi Tenggara juga mengembangkan website yang diberi nama *kota.co.id* dimana

betujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dalam pemerintahan daerah secara transparansi.

4) Meningkatkan Utilisasi Infrastruktur TIK Yang Terintegrasi Dan Berbagi Pakai Bagi Instansi Pemerintah Pusat/Daerah

Terciptanya Utilisasi Infrastruktur TIK Dengan Adanya Upaya Pemanfaatan Dan Pengembangan SPBE Penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh Indonesia menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan konektivitas digital. Utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan pengembangan PSBE saat ini dalam proses pengembangan di wilayah Sulawesi Tenggara . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Kendari mengenai utilisasi infrastruktur Teknologi harus adanya komunikasi yang terintegrasi bagi instansi Pemerintah Kota agar bersama-sama bertanggung jawab dalam menyiapkan infrastruktur. Aplikasi yang terintegrasi dalam berbagai pakai yang saat ini dikembangkan di wilayah Sulawesi Tenggara yakni LAIKA yang sebelumnya dibuat untuk administrasi elektronik perangkat desa/kelurahan namun saat ini bertransformasi menjadi aplikasi pelayanan masyarakat seperti pembuatan Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk (KTP) , dan beberapa surat lainnya. Berdasarkan hasil interview Kepala Bidang E-Government. pengembangan aplikasi ini bisa dikatakan baik sayangnya aplikasi lingkup OPD tersebut berjalan sendiri tanpa ada yang mewadahi. Dengan kata lain, penggunaan dan pengembangan aplikasi ini harus diperkenalkan kepada masyarakat sebagai aplikasi pelayanan masyarakat dan aplikasi ini harus diintegrasikan pemakaian secara resmi baik secara software harus ditingkatkan kredibilitas penggunaannya.

5) Terwujudnya Keamanan Informasi Pemerintah

Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Dalam Fungsi Sistem Manajemen Keamanan SI daerah saat ini sedang menjadi salah satu propaganda dalam pemerintahan. Penggunaan TIK yang kompleks menjadi ancaman Keamanan Informasi. Keamanan Informasi meliputi aspek kerahasiaan hingga ketersediaan layanan, sehingga mengganggu kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Peran sumber daya informasi dan TIK semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan dalam upaya perwujudan good governance. Beberapa kasus mengenai system down dikarenakan beberapa oknum yang coba meretas system yang sedang dikembangkan oleh pemerintah kota Kendari demi meningkatkan keamanan informasi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian meberikan beberapa gambaran yakni salah satunya adalah adanya regulasi antara pemerintah dan Keminfo untuk menyusun aturan terkait layanan SPBE mengenai tata kelola dari segi informasi dan komunikasi. Selain itu, harus adanya saling dukung antar beberapa pihak terkait dalam mengupayakan keamanan informasi sebagaimana kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan SPBE didareah.

3.2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam mengembangkan Sistem Pemeintahan Berbasis Elektronik

Dalam bentuk Fungsi sistem manajemen keamanan SI daerah, faktor

keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Aspek ini penting karena mencakup kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) 3. Ancaman tersebut membutuhkan sebuah tata kelola keamanan informasi di setiap organisasi/ instansi tidak terkecuali instansi penyelenggara pelayanan publik milik pemerintah. Demikian perlu ditingkatkan kesiapan dan kewaspadaan terhadap ancaman serangan keamanan informasi pada instansi pemerintah terutama pada infrastruktur kritis milik pemerintah.

Formulasi Strategi (Analisis SWOT) Rangkuti(2014:19)

Tabel 3.1
Matriks SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <p>a) Aplikasi LPSE sebagai layanan pengadaan barang jasa pemerintah</p> <p>b) Layanan Pengaduan Publik (SP4N)</p>	<p>WEAKNESSES (W)</p> <p>a) Belum adanya kebijakan internal dari pemerintah</p> <p>b) Belum memiliki Induk SPBE</p> <p>c) Pemkot belum mempunyai layanan manajemen Kinerja</p> <p>d) Masalah server</p>
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <p>a) Peningkatan SDM tenaga ahli IT untuk keamanan website</p> <p>b) Penggunaan layanan SP4N dalam memudahkan masyarakat dalam pengaduan publik</p>	<p>STRATEGI W-O</p> <p>1. Membuat kebijakan internal dari pemerintah untuk penguatan pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>2. Membuat rencana induk SPBE di diskominfo Kota Kendari</p> <p>3. Memperbaiki kendala jaringan atau server agar pelayanan pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan baik</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>a) sistem keamanan</p>	<p>STRATEGI S-T</p> <p>1. Pemerintah melakukan peningkatan mengenai keamanan data di aplikasi layanan publik terkait penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>STRATEGI W-T</p> <p>1. Memaksimalkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran dalam melakukan pengembangan SPBE</p>

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Strategi S-O

Kolom strategi S-O adalah yang menggunakan kekuatan dengan mengambil keuntungan peluang yang ada. Beberapa strategi yaitu Memanfaatkan SDM ahli IT untuk penggunaan Aplikasi LPSE sebagai layanan pengadaan barang jasa pemerintah serta Memanfaatkan layanan pengaduan public yang telah terintegrasi(SP4N) jika ada pengaduan mengenai pelayanan publik

2. Strategi W-O

Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi W-O yang dihasilkan yaitu Membuat kebijakan internal dari pemerintah untuk penguatan pemerintahan berbasis elektronik, membuat rencana induk SPBE di diskominfo Kota Kendari dan memperbaiki kendala jaringan atau server agar pelayanan pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan baik

3. Strategi S-T

Strategi ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki usaha. Beberapa strategi adalah Pemerintah melakukan peningkatan mengenai keamanan data di aplikasi layanan publik terkait penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

4. Strategi W-T

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Adapun strateginya yaitu Memaksimalkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran dalam melakukan pengembangan SPBE

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai pentingnya penerapan dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengingat kemajuan teknologi yang menuntut zaman memanfaatkan alat elektronik dalam berbagai sektor termasuk pemerintahan. Yang menarik dari temuan ini menggunakan analisis strategi SWOT untuk mengurangi menghindari dan mengurangi dampak dari ancaman dengan memanfaatkan peluang dengan kekuatan.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Salah satu hal yang paling mempengaruhi pengembangan SPBE dalam penatausahaan pemerintahan adalah data mudah diperoleh dengan cepat dan waktu yang dibutuhkan tidak lama atau dengan kata lain pengembangan SPBE ini sangat efektif. Pengembangan SPBE tentunya membutuhkan biaya yang harus dipersiapkan dengan matang. SPBE harus iaktualisasikan bersama pemerintah setempat dan Dinas Kom unikasi dan Informatika . Apabila secara finansial dan praktisi terjamin dengan jelas maka proses pengembangan PSBE akan dimaksimalkan semaksimal mungkin. Pemerintah Kota menjadikan LAIKA sebagai metadata dimana menjadi satu data untuk menghubungkan antar instansi yang tentunya sangat efektif fikalangan

pertatausahaan pemerintahan. Dalam mengaktualisasikan SPBE masih terkendala signal namun praktisi dari IT dan jaringan yakni Telkom bersedia untuk berintegrasi dalam mengatasi blank spot didelapan titik kelurahan terkait Perlunya koordinasi dari beberapa pihak untuk mengintegrasikan OPD untuk keterhubungan kantor pemerintah instansi terkait dengan usulan BTS tunggal demi menanggulangi take down signal dalam penggunaan system.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang menjadi kekurangan penelitian yaitu waktu pelaksanaan penelitian yang singkat sehingga membatasi pergerakan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan serta kesulitan untuk mengakses data pendukung.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari bahwa masih awalnya hasil temuan pada penelitian ini, dengan demikian diharapkan untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam pada lokasi dan focus yang serupa berkaitan dengan. strategi pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan pengembangan pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE) melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kendari yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aligica, P. D., Boettke, P. J., & Tarko, V. (2019). *Dynamic Governance. Public Governance and the Classical-Liberal Perspective*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190267032.003.0004>
- Nurdin, I, & Hartati, S. (2019). *Metedologi Penelitian Sosial* . Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Pedoman evaluasi tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik Oleh Kemenpan-Rb
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Metode Penelitian dan Pengembangan*
- Gafar, T. F., & Abdurrab, U. (2018). *DYNAMIC GOVERNANCE - Embedding Culture , Capabilities and Change in REVIEW BUKU Judul : DYNAMIC GOVERNANCE Embedding Culture , Capabilities and Change in Singapore Penulis : Boon Siong Neo and Geraldine Chen Penerbit : World Scientific Publishing Co . Pte, (February).*
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penlitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. In Kencana.*
- Sunarno, S. H. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (7)*

- Seruyankab.Go.Id.* Retrieved from <https://seruyankab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/18-19-spbe.pdf>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Perwali Kendari No.51 Tahun 2019.pdf. (n.d.).
- PP-Nomor-96-Tahun-2012_PelayananPublik.pdf. (2012).
- Amin, M. (2014). Penilaian Potensi Daerah Sulawesi Tenggara dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Regional. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 17(1), 15–22.
- ANRI : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum. (2019). Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi ANRI Tahun 2019, 1–106.
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Bimasakti, F. (2017a). Jurnal tatakelola pemerintahan berbasis. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(14010113130140), 1–18.

